

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, ORGANISASI NONLABA, YAYASAN, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, ISAK 35, AKUNTABILITAS

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat ringkasan deskripsi dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan fenomena serupa tetapi mengangkat permasalahan dengan subjek penelitian berbeda. Dijadikan referensi bagaimana hasil penelitian dapat diperoleh. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Maulidatul Faridah (2021) berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Yayasan Al-Fatimah Surabaya Dalam Perspektif ISAK 35”. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah kualitatif. Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif analisis. Peneliti memperoleh hasil penelitian berupa, Yayasan Al-Fatimah Surabaya belum memenuhi empat unsur laporan keuangan serta belum mengenal ISAK 35. Akuntabilitas belum dilaksanakan secara maksimal ditunjukkan dari tidak adanya pengungkapan kondisi keuangan yayasan kepada masyarakat umum ataupun donatur.
2. Penelitian dilakukan oleh Saskia Aurora Putri (2020) berjudul “Analisis Kesiapan Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 dan SAK ETAP Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Di Yayasan Sayap

Ibu Cabang D.I Yogyakarta)”. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data dilakukan dengan empat tahapan yang ditetapkan oleh peneliti. Peneliti memperoleh hasil penelitian berupa, Yayasan Sayap Ibu memiliki kesiapan sebesar 65% dan sebesar 35% belum memiliki kesiapan dalam penyajian laporan keuangan organisasi berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 35 dan SAK ETAP.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jevri Ansari (2021) berjudul “Penerapan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Al-Marhamah Medan)”. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah kualitatif deskriptif. Metode observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data dilakukan secara analisis kualitatif atau nonstatistik. Peneliti memperoleh hasil penelitian berupa, Panti Asuhan Al-Marhamah Medan pada tahun 2020 menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus Kas, , Laporan Posisi Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal tersebut menunjukkan bentuk laporan keuangan telah disesuaikan dengan konsep ISAK 35. Meningkatkan kualitas laporan keuangan berfungsi bagi pemberi bantuan untuk membaca bagaimana laporan keuangan tersebut,

mempermudah untuk mengetahui *surplus (defisit)* aset panti asuhan tahun berjalan, dan untuk membantu tahun-tahun berikutnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afifah dan Fadli Faturrahman (2021) berjudul “Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi ISAK 35 Pada Yayasan An-Nahl Bintang”. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah kualitatif. Metode wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data dilakukan secara metode triangulasi sumber. Peneliti memperoleh hasil penelitian berupa, Penerapan akuntabilitas Yayasan An-Nahl belum dilaksanakan dengan sempurna, sebab dari lima indikator akuntabilitas hanya dua yang diterapkan. Standar akuntansi ISAK 35 belum diterapkan pada laporan keuangan Yayasan An-Nahl. Laporan keuangan yang dihasilkan hanya berupa laporan pemasukan dan pengeluaran secara umum.
5. Penelitian dilakukan oleh Arkan Nabil Fauzan (2021) berjudul “Penerapan Laporan Keuangan Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Yayasan Ar-Rahmah di Bogor Tahun 2020)”. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah studi kasus. Metode survei dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif, yakni dilakukan dengan mengumpulkan dan menyusun hingga menemukan gambaran laporan keuangan. Peneliti memperoleh hasil penelitian berupa, Laporan keuangan Yayasan Ar-

Rahmah belum sesuai dengan perspektif ISAK 35, pelaporan oleh yayasan sebatas pencatatan kas masuk dan kas keluar.

Tabel 2.1.
Kajian Pustaka

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Maulidatul Faridah (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Yayasan Al-Fatimah Surabaya Dalam Perspektif ISAK 35	Kualitatif	Yayasan Al-Fatimah Surabaya belum memenuhi empat unsur laporan keuangan serta belum mengetahui ISAK 35. Akuntabilitas belum dilaksanakan secara maksimal ditunjukkan dari tidak adanya pengungkapan kondisi keuangan yayasan kepada masyarakat umum ataupun donatur.
2	Saskia Aurora Putri (2020)	Analisis Kesiapan Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Berdasarkan ISAK	Kualitatif	Yayasan Sayap Ibu memiliki kesiapan sebesar 65% dan 35% belum memiliki kesiapan dalam penyajian laporan keuangan organisasi berorientasi nonlaba

		35 dan SAK ETAP Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Di Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I Yogyakarta)		berdasarkan ISAK 35 dan SAK ETAP.
3	Jevri Ansari (2021)	Penerapan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Al- Marhamah Medan)	Kualitatif deskriptif	Panti Asuhan Al-Marhamah Medan pada tahun 2020 menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus Kas, , Laporan Posisi Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal tersebut menunjukkan bentuk laporan keuangan telah disesuaikan dengan konsep ISAK 35.

				<p>Meningkatkan kualitas laporan keuangan berfungsi bagi pemberi bantuan untuk membaca bagaimana laporan keuangan tersebut, mempermudah untuk mengetahui <i>surplus (defisit)</i> aset panti asuhan tahun berjalan, dan untuk membantu tahun-tahun berikutnya.</p>
4	<p>Nurul Afifah dan Fadli Faturrahman (2021)</p>	<p>Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi ISAK 35 Pada Yayasan An-Nahl Bintang</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penerapan akuntabilitas Yayasan An-Nahl belum dilaksanakan dengan sempurna, sebab dari lima indikator akuntabilitas hanya dua yang diterapkan. Standar akuntansi ISAK 35 belum diterapkan pada laporan keuangan Yayasan An-Nahl. Laporan keuangan yang dihasilkan hanya berupa</p>

				laporan pemasukan dan pengeluaran secara umum.
5	Arkan Nabil Fauzan (2021)	Penerapan Laporan Keuangan Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Yayasan Ar-Rahmah di Bogor Tahun 2020)	Studi kasus	Laporan keuangan Yayasan Ar-Rahmah belum sesuai dengan perspektif ISAK 35, pelaporan oleh yayasan sebatas pencatatan kas masuk dan kas keluar.

2.2. Organisasi Nonlaba

2.2.1. Definisi Organisasi Nonlaba

Tercantum dalam ISAK 35 organisasi yang bergerak tidak berorientasi terhadap penghasilan laba yaitu “nonlaba” (*“not-for-profit”*). Organisasi nonlaba merupakan entitas dengan kegiatan operasinya tidak berorientasi terhadap laba atau keuntungan untuk mencapai suatu tujuan yang mulia (Widodo dan Kustiawan, 2001). DK 06 pada ISAK 35 menjelaskan bahwa, organisasi “nonlaba” tidak berorientasi pada laba tapi bukan berarti tidak menghasilkan laba. Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa organisasi nonlaba merupakan organisasi memiliki tujuan mulia dalam memberikan pelayanan terhadap publik, dengan kegiatan operasionalnya tidak berorientasi pada penghasilan laba, tetapi bukan berarti tidak menghasilkan laba.

2.2.2. Karakteristik Organisasi Nonlaba

Organisasi nonlaba meskipun tidak bertujuan untuk menghasilkan laba yang besar, namun tidak diperkenankan dalam keadaan defisit. Laba (surplus) yang tetap dihasilkan diperuntukan untuk mencapai tujuan organisasi nonlaba dalam bentuk kegiatan sosial maupun digunakan untuk kegiatan operasional di masa mendatang dengan tetap diperuntukan untuk pelayanan publik (Yuesti, 2020).

Disebut sebagai sebuah organisasi berorientasi nonlaba dapat dilihat dari beberapa faktor pertimbangan dibawah ini yang didasarkan tertera pada DK12 dalam ISAK 35, yaitu :

- a. Apakah pemberi sumber daya organisasi tidak mengharapkan timbal balik manfaat ekonomi yang sepadan dengan apa yang telah diberikan sebagai sumber daya organisasi.
- b. Menghasilkan barang atau jasa tidak bertujuan pada peroleh keuntungan, tetapi jika dari hasil produksi tersebut menghasilkan laba, maka laba yang dihasilkan tidak boleh dibagikan kepada pemilik maupun pengelola organisasi.
- c. Sistem kepemilikan pada organisasi berorientasi nonlaba berbeda dengan organisasi bisnis, karna status kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau tidak mencerminkan pembagian sumber daya jika organisasi di likuidasi.

2.3. Yayasan

2.3.1. Dasar Hukum Yayasan

Yayasan merupakan salah satu bentuk organisasi berorientasi nonlaba yang sah secara hukum dan diatur dalam undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa :

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Terdapat beberapa poin atau pasal di dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang disempurnakan dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2002 tentang Yayasan. Pelaksanaan UU tentang Yayasan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

2.3.2. Kekayaan Yayasan

Pemaparan mengenai kekayaan Yayasan tercantum di dalam pasal 5 ayat

(1) UU Nomor 28 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas”.

Dimuat dalam Pasal 26 UU Nomor 16 Tahun 2001 menjelaskan pada Ayat (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Kemudian pada Ayat (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

- b. wakaf;
- c. hibah;
- d. wasiat;
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3. Organ Yayasan

Sebuah yayasan saat didirikan dan melaksanakan kegiatan operasional membutuhkan organ yayasan. Disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 16 tahun 2001 bahwa, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Definisi serta kewenangan tiap organ Yayasan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pembina

Pada bagian pertama diatur dalam Pasal 28 – Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2001. Dalam Pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa, Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar. Pembina dapat dikatakan memiliki posisi tertinggi karna dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun mendatang seperti yang dimuat dalam Pasal 30.

2. Pengurus

Pada bagian kedua yang diatur dalam Pasal 31 – Pasal 39 UU Nomor 16 tahun 2001. Dalam Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. seorang ketua;
2. seorang sekretaris; dan
3. seorang bendahara.

3. Pengawas

Pada bagian ketiga yang diatur dalam Pasal 40– Pasal 47 UU Nomor 16 tahun 2001. Dalam Pasal 40 ayat (1) dijelaskan bahwa Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.

2.4. Penyajian Laporan Keuangan

2.4.1. Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas atas pengungkapan informasi (Diamond, 2002). Berdasarkan PSAK 1, definisi laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut

Soemarso (2004) menyatakan bahwa, laporan keuangan adalah laporan yang disusun untuk para pemangku kepentingan, terutama pihak eksternal organisasi, tentang kondisi keuangan dan hasil kinerja organisasi. Suatu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi bagi pihak yang berkepentingan (Suteja, 2018). Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan definisi dari laporan keuangan adalah laporan hasil proses akuntansi yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja organisasi dalam periode tertentu diperuntukan bagi pihak terkait.

2.4.2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan sangat berguna bagi pihak yang ingin mengetahui kinerja dari suatu organisasi yang dapat tercermin melalui informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan penyajian laporan keuangan tercantum di dalam PSAK 1, yakni untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja suatu organisasi yang berguna bagi pengguna informasi keuangan. Penyajian laporan keuangan memiliki beberapa tujuan yang dikemukakan oleh Kasmir (2014), yaitu:

- a. Menyajikan penjelasan tentang jenis dan jumlah harta yang dimiliki organisasi
- b. Menyajikan penjelasan tentang hutang dan ekuitas yang dimiliki organisasi
- c. Menyajikan penjelasan tentang pendapatan yang diperoleh organisasi

- d. Menyajikan penjelasan tentang jenis dan jumlah biaya yang digunakan oleh organisasi
- e. Menyajikan penjelasan tentang keadaan yang terjadi pada aset, hutang, dan ekuitas organisasi
- f. Menyajikan penjelasan tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

2.5. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35

2.5.1. Definisi ISAK 35

ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Berorientasi Non Laba* merupakan standar akuntansi yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan bagi organisasi nonlaba setelah dicabut PSAK 45. Mulai efektif diberlakukan pada 1 Januari 2020 dan terdiri atas paragraf 1-13 dilengkapi dengan dasar kesimpulan dan contoh ilustrasi.

2.5.2. Ruang lingkup ISAK 35

Ruang lingkup ISAK 35 dalam mengatur penyajian laporan keuangan organisasi berorientasi nonlaba, meliputi:

- a. Interpretasi ini diterapkan untuk organisasi berorientasi nonlaba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut.
- b. Interpretasi ini diterapkan juga oleh organisasi berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
- c. Diterapkan fokus untuk penyajian laporan keuangan.

2.5.3. Interpretasi

Pedoman penyajian laporan keuangan organisasi berorientasi nonlaba khusus didasari ISAK 35 yang merupakan interpretasi langsung dari PSAK 1. Adapun interpretasi tersebut, yaitu:

1. Persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1 menjadi perhatian bagi penyusunan penyajian laporan keuangan organisasi berorientasi nonlaba.
2. Penyesuaian deskripsi pada pos-pos tertentu digunakan organisasi berorientasi nonlaba dalam laporan keuangan.
3. Penyesuaian deskripsi dapat digunakan organisasi berorientasi nonlaba untuk laporan keuangan itu sendiri.
4. Menjaga agar kualitas informasi laporan keuangan organisasi berorientasi nonlaba tidak berkurang harus mempertimbangkan segala fakta dan situasi relevan dalam penyajian laporannya termasuk Catatan atas Laporan Keuangan.

2.5.4. Laporan Keuangan ISAK 35

Berdasarkan ISAK 35 laporan keuangan organisasi nonlaba terdiri atas lima komponen. Komponen tersebut yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Format beserta penjelasan penyajian laporan keuangan tersaji sebagai pedoman bagi organisasi nonlaba sesuai standar yang telah diperbaharui.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menunjukkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan informasi dari mana sumber daya tersebut berasal (Rudianto, 2012). Tujuan Laporan Posisi Keuangan untuk memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto pada waktu tertentu (IAI, 2021). Pengungkapan informasi dalam Laporan Posisi Keuangan dapat membantu pihak terkait untuk menilai:

- a. kemampuan organisasi nonlaba dalam memberikan jasa secara berkelanjutan
- b. likuiditas, fleksibilitas, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Terdapat dua format Laporan Posisi Keuangan dalam ISAK 35 yang disajikan sebagai contoh. Setiap format memiliki keunggulan tersendiri.

Berikut format Penyajian Laporan Posisi Keuangan:

- a. Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sesuai dengan kelas aset netonya.
- b. Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif memiliki tujuan utama adalah menyajikan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lain.

Laporan penghasilan komprehensif menyajikan informasi mengenai:

- c. pengaruh transaksi yang dapat mengubah pendapatan

- d. hubungan antar transaksi mengenai beban
- e. penggunaan sumber daya oleh organisasi dalam kegiatan operasional.

Laporan Penghasilan Komprehensif dapat disajikan dalam dua format yang dijadikan sebagai pedoman. Keunggulan tersendiri dimiliki kedua format tersebut. Berikut format Penyajian Laporan Penghasilan Komprehensif:

- a. Format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal memudahkan penyusunan laporan secara komparatif
- b. Format B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto.

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan Perubahan Aset Neto menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kelas aset netonya. Aset neto berasal dari dua klasifikasi, yaitu:

- a. Aset Neto Tanpa Pembatasan (*without restrictions*)

Aset neto yang tidak ada batasan terhadap kegunaan aset tersebut oleh pemberi sumber daya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Organisasi memiliki keleluasaan terhadap penggunaan sumber daya untuk kebutuhan organisasi.

- b. Aset Neto Dengan Pembatasan (*with restrictions*)

Aset neto dengan pembatasan adalah aset neto yang berkaitan dengan pemberi sumber daya yang memiliki tujuan terhadap suatu aktivitas operasional tertentu dan memiliki jangka waktu tertentu.

Format A dan Format B disesuaikan dengan format laporan lain yang digunakan oleh organisasi.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan kas tersebut. Berdasarkan PSAK 2 (IAI, 2021), metode pencatatan terhadap kas masuk dan kas keluar dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. metode langsung, metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan;
- b. metode tidak langsung, metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat nonkas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Dijelaskan pada paragraph 112 dalam PSAK 1 bahwa, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memiliki beberapa fungsi penting dalam penyajian laporan keuangan, yaitu:

- a. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraph 117-124 mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi;

- b. mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
- c. menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.6. Akuntabilitas Publik

2.6.1. Konsep Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris, yakni *accountability* dapat diartikan sebagai sebuah pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban yang berasal dari lembaga publik yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik untuk menjawab berbagai hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban (Rakhmat, 2009). Menurut Mardiasmo (2002), definisi dari akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dalam kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggungjawaban penerima amanah atas pengelolaan sumber daya publik kepada pemberi amanah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.6.2. Jenis Akuntabilitas Publik

Berdasarkan jenis akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002), dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Akuntabilitas vertikal (internal) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal. Bentuk penerapan akuntabilitas vertikal di dalam Yayasan ialah hasil kinerja yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan di laporkan kepada Pembina Yayasan.
- b. Akuntabilitas horizontal (eksternal) melekat pada setiap lembaga sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungan. Bentuk penerapan akuntabilitas horizontal di dalam Yayasan ialah penyajian laporan keuangan kepada pihak pemberi sumber daya seperti pihak donatur.

2.6.3. Dimensi Akuntabilitas Publik

Menurut Hopwood & Tomkins (1983) dan Elwood (1993) dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga sektor publik diantaranya meliputi beberapa hal di bawah ini, yaitu (Mardiasmo,2002):

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum ditujukan kepada lembaga sektor publik untuk berperilaku berdasarkan kejujuran dan taat dengan hukum yang berlaku. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan yang dapat terjadi, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan lembaga sektor publik terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan kesesuaian lembaga sektor publik dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dengan memenuhi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Implementasinya dengan memberikan pelayanan publik yang responsif.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan organisasi dapat tercapai atau tidak, dan apakah terdapat organisasi telah mempersiapkan program alternatif dengan hasil yang optimal namun dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban organisasi publik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil dan diterapkan dalam organisasi.